

---

## Partisipasi Masyarakat Desa Perdamaian Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Dalam Pemilu

Gaby Agustina Nainggolan<sup>1</sup>, Gelora Sembiring<sup>2</sup>, Mutiara Azzahra Lubis<sup>3</sup>, Linton Naibaho<sup>4</sup>, Putri Andini<sup>5</sup>, Wulan Ayu Trisna<sup>6</sup>, Yunita Manurung<sup>7</sup>, Prayetno<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

Email: <sup>1</sup>Gebyan04@gmail.com, <sup>2</sup>Gelorasembiring@gmail.com, <sup>3</sup>tiaaraazzahralubis@gmail.com, <sup>4</sup>lintonrajaoloan@gmail.com, <sup>5</sup>putriandini040703@gmail.com, <sup>6</sup>manurungjunita917@gmail.com, <sup>7</sup>wulanayutrisna@gmail.com, <sup>8</sup>eno.pray@gmail.com

### Abstrak

Partisipasi pemilu dapat dipahami keterlibatan warga dalam pesta demokrasi bukan hanya mencoblos, namun ikut dalam segala tahapan pemilu kegiatan pemilu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengklarifikasi suatu deskripsi, kondisi, atau hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada. Dalam partisipasi masyarakat di desa Perdamaian dalam pemilu, sudah baik karena adanya kesadaran masyarakat dan adanya program dari desa Perdamaian bekerjasama dengan partai politik. Bagi masyarakat yang masih kurang berpartisipasi dalam pemilu perlu dilakukan pendekatan yang pemerintah desa dan partai politik. Dari hasil penelitian yang kami lakukan walaupun antusias masyarakat dalam partisipasi pemilu cukup bagus, namun beberapa masyarakat ada juga yang tidak peduli dengan pemilu. Dari keterangan masyarakat mengatakan bahwa hal tersebut di pengaruhi beberapa faktor yaitu 1). Sikap apatis dari warga tersebut, 2). Umur yang sudah lanjut usia jadi mereka susah diberikan masukan, 3). Adanya kekecewaan terhadap kandidat yang dipilih pada pemilu sebelumnya, sehingga warga tersebut merasa bahwa siapa yang terpilih nantinya tidak akan menepati janjinya.

**Kata Kunci:** Partisipasi, Pemilu, Masyarakat

### PENDAHULUAN

Salah satu pilar sistem demokrasi adalah eksistensi mekanisme penyalur pendapat rakyat dalam pemilihan umum secara berkala diselenggarakan secara teratur. Pemilihan parlemen juga merupakan salah satu cara pembagian hak asasi warga negara. Sejak kemerdekaan pada pemilihan parlemen tahun 1945 (selanjutnya disebut pemilu) sebelas kali dari pemilu pertama tahun ini. Dari tahun 1955 hingga pemilihan tahun 2019. Tahun pemilihan Tahun 2024 akan menjadi pemilihan parlemen yang ke-13 di Indonesia. Pemilihan parlemen merupakan bukti nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi secara langsung pejabat terpilih. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan masih ada di tangan rakyat.

Di Indonesia sendiri pemilu diadakan 5 tahun sekali baik pemilihan legislatif maupun eksekutif. Adapun salah satu alasan diadakannya Pemilu cepat adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan (legitimasi) dari masyarakat termasuk dunia internasional, karena pemerintah dan lembaga lainnya yang merupakan hasil dari pemilu 1997 dianggap tidak dapat diandalkan. Hal lalu ada rapat umum MPR Rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru, termasuk Wakil Presiden Keanggotaan di Dewan Deputi dan Majelis Deputi sebelum menyelesaikan pekerjaan Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak negara di dunia yang mengikutinya sistem politik demokrasi yang pemerintahannya berasal dari rakyat oleh manusia dan untuk manusia. Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Jadi setiap warga negara berhak memilih wakil rakyat yang diinginkannya untuk mewakilinya dalam kekuasaan. Dalam hal tersebut maka dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, supaya pesta demokrasi tersebut berjalan dengan baik dan sesuai konstitusi yang diharapkan oleh negeri ini.

Partisipasi politik bekerja dalam kaitannya dengan demokrasi legitimasi negara. Semakin tinggi partisipasi politik berarti bahwa orang mengikuti dan memahami dan berpartisipasi di dalamnya kegiatan pemerintahan. Di sisi lain, ketika orang acuh tak acuh terhadap masalah atau kinerja negara menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi politik. Partisipasi politik juga terkait dengan perwujudan hak politik warga negara. Hal ini tercermin dari partisipasi mereka dalam pemilu ini juga salah satu sarana demokrasi. Dari sudut pandang konstitusi, pemilu merupakan ukuran demokratisasi negara. Jadi jangan begitu saja

kunci untuk menciptakan demokrasi, tetapi pemilu juga merupakan sumber daya bagi orang biasa menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintahan. Itu pilihannya cara orang dapat memilih perwakilan mana yang mereka duduki badan eksekutif dan legislatif. Bentuk partisipasi dapat dilihat dalam beberapa kategori, yaitu orang yang apatis yang menarik diri dari proses politik dan penonton adalah orang yang berpartisipasi aktif dalam proses politik, yaitu sebagai komunikator yang memiliki tugas khusus untuk bertahan. tatap muka - kontak tatap muka, kegiatan partai dan kegiatan buruh dan masyarakat (Indriany 2020).

Dalam partisipasi masyarakat desa perdamaian kecamatan Tanjung Morawa kabupaten Deli Serdang dalam Pemilu, dahulu banyak masyarakat yang masih bersifat acuh terhadap proses pemilu, misalnya mereka menganggap memilih atau tidaknya hal itu tidak ada berpengaruh terhadap kehidupannya, padahal perlu kita tau bahwa setiap suara masyarakat sangat berpengaruh dalam proses pemilu, setiap masyarakat mempunyai hak dalam melakukan pemilu, namun sejak berjalanya waktu berkala realitasnya masyarakat Desa Perdamaian sudah melakukan partisipasi politik yang baik dengan menyuarakan dan berani menyampaikan aspirasinya. Hal tersebut perlu di pertahankan demi terjalinya proses pemilu di desa tercinta ini.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan terhadap partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan sarana dalam melaksanakan pembangunan dan terlaksananya demokrasi politik. Jadi kesuksesan dalam pemilihan kepala desa tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi masyarakat ketika menyuarakan hak pilihnya tentunya untuk membangun demokrasi, artinya partisipasi ini memiliki jiwa kesadaran yang di ampuh oleh khalayak yang melaksanakan dan bertanggung jawab terkait pilihannya sendiri. (Subiyanto 2020)

## **B. Kajian teori**

### **1. Partisipasi politik**

Adapun pengertian partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoft partisipasi politik sebagai kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan. Segala kegiatan warga Negara yang mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum termasuk dalam memilih pemimpin pemerintahan dapat digolongkan sebagai kegiatan partisipasi politik (Damsar, 2010:181). Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam bukunya yang berjudul pembangunan politik di Negara-negara berkembang memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Menurut mereka, partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, karena partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif (dalam Miriam Budiharjo, 2008:368).

Keputusan merupakan medan persaingan untuk mengisi jabatan politik dalam pemerintahan berdasarkan pilihan formal warga negara yang memenuhi syarat. dalam waktu Dalam balapan tingkat lanjut, balapan melibatkan posisi penting karena terkait dengan beberapa hal; Memulai dengan, Keputusan memiliki posisi kritis bagi kelanjutan pemerintahan mayoritas agen. Momen, balapan menjadi penunjuk kekuasaan mayoritas pemerintah. Dhal mengatakan bahwa dua dari enam karakteristik ajaran politik yang dibutuhkan oleh pemerintahan mayoritas skala besar terkait dengan keputusan, otoritas yang dipilih secara khusus dan keputusan yang bebas, masuk akal, dan sesekali. Ketiga, keputusan adalah keharusan berbicara tentang terlalu terkait dengan saran keputusan yang luas, dalam tahap itu Huntington menyebut keputusan sebagai implikasi dan tujuan demokratisasi. Penjelasan menarik diri dari kenyataan jatuhnya penguasa diktator sebagai akibat dari keputusan Bersama mereka mendukung diri mereka sendiri karena mereka berusaha untuk melanjutkan keaslian melalui balapan. (Ranadireksa, 2007).

Individu membuat kontrak sosial dengan pelopor melalui keputusan. Kapan keputusan individu dapat memilih sosok yang dapat dipercaya untuk mengisi posisi otoritatif dan resmi. Dalam keputusan, individu yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih, tanpa syarat, dan rahasia, menentukan pilihannya pada sosok yang dinilai menyetujui cita-citanya. Oleh selanjutnya, kontrol yang dimiliki oleh para perintis sekarang tidak muncul sejak itu dirinya sendiri, tetapi bergantung pada individu melalui keputusan. Singkatnya, ras yang umum adalah Ilustrasi kepentingan politik adalah pergerakan warga konvensional dalam mempengaruhi pendekatan pemerintah. Secara substansi, ras umum adalah cara dan implikasi tersedia bagi individu untuk memutuskan agen mereka yang akan duduk di dalam tubuh agen individu untuk mengatasi pengaruh individu. Ras sangat penting untuk semua orang, pada saat itu keputusan adalah penanda pemerintahan mayoritas suatu negara. Menarik diri dari definisi kepentingan politik dalam ras umum. Kesimpulannya, pemikiran tentang ini apalagi tidak bisa menafikan ciri-ciri sosial yang terjadi di dalamnya protes penyelidikan, khususnya Garut. Karena dalam kesimpulannya, analis juga harus bisa mengatakan ya ada variabel lain yang mempengaruhi kepentingan politik ini. Pertimbangan

hasil dari pertanyaan Seymour Martin Lipset, dalam *Political Man: the Social Bases of Legislative issues* (1960) dalam Miriam Budihardjo, 2008) menyatakan dengan sangat gamblang bahwa sorotan sosial mempengaruhi dukungan politik. Karakteristik sosial ini meliputi upah, pengajaran, pekerjaan, ras, orientasi seksual, usia, tempat tinggal, keadaan dan status organisasi. Dengan demikian ciri-ciri sosial masyarakat garut menjadi bumbu pelengkap dalam wacana penyelidikan ini.

## **2. Partisipasi masyarakat**

Istilah partisipasi banyak dimaknai oleh banyak ahli sebagai upaya partisipatif Sebuah komunitas beraksi yang jika dikaitkan dengan pembangunan, akan terjadi ada upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Istilah lain dari partisipasi yang diwujudkan dalam sering digunakan gotong royong. Menurut Budiono (1999), gotong-royong adalah usaha yang dilakukan kolektif tanpa kompensasi untuk kepentingan bersama. dalam arti Widiyanti dan Sunindha (1989) mendefinisikannya sebagai bisnis yang diselenggarakan bersama, yang dapat dilaksanakan sesuai dengan peran serta.

Achmadi (1978) menambahkan bahwa partisipasi masyarakat adalah swadaya Gotong royong adalah modalnya. Meskipun swadaya didefinisikan kemampuan sekelompok orang dengan kesadaran dan prakarsa sendiri Berusaha memenuhi kebutuhan. Menurut Cohen dan Uphoff (Ndraha; 1990) bahwa partisipasi dapat menjadi hasil dan sumbangan bagi pembangunan.

Terkait dengan konsep partisipasi dan hubungannya dengan program pembangunan dan Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat merupakan unsur yang sangat penting. Perhitungan partisipasi masyarakat, program pembangunan yang dilaksanakan Draft on Paper (Pusic dalam Adi; 2001). Berdasarkan pendapatnya Keterlibatan atau keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari dua segi hal yaitu; Partisipasi dalam perencanaan dan partisipasi dalam implementasi. Keduanya Ini memiliki kelebihan dan kekurangan, juga dalam hal partisipasi Perencanaan dan partisipasi dalam implementasi.

Berdasarkan konsep partisipasi masyarakat di atas, maka dapat disimpulkan juga bahwa masyarakat ikut terlibat partisipasi aktif masyarakat baik moral maupun material, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yang meliputi: kepentingan individu. Dengan demikian, partisipasi masyarakat sudah pasti menjadi begitu penting dalam segala bentuk kegiatan pembangunan karena Dengan dukungan orang-orang yang berinteraksi satu sama lain, selalu ada harapan untuk keberhasilan operasional. (Ramli 2013)

## **3. Pilihan rasional**

Coleman<sup>3</sup> menguraikan hipotesis pilihan berkepala dingin sebagai petunjuk aktivitas orang terhadap suatu tujuan dan melihat bahwa tujuan itu ditentukan oleh harga diri atau kecenderungan. Ada dua sebagian besar komponen dalam hipotesis Coleman (Miriam Budihardjo, 1998) adalah karakter dan aset di layar. Seniman pertunjukan adalah mereka yang memilih aktivitas yang memaksimalkan utilitas atau pemenuhan kebutuhan dan kebutuhan mereka. Padahal aset itu sesuatu yang ane hpertimbangan dan yang dapat dikontrol oleh karakter di layar.

Karya Downs (Swamp & Stoker, 2010), kemajuan pilihan suara dalam bermacam-macam bantalan. Hipotesis pilihan yang bijaksana mengambil kecenderungan seseorang, keyakinan, dan teknik dicapai sebagai penyebab aktivitas apa yang mereka lakukan. Variasi standar pilihan bijaksana menerima orang-orang itu memiliki semua kapasitas koneksi yang bijaksana, waktu, dan penuh gairah yang penting untuk pilih aktivitas yang bagus, tidak peduli seberapa rumit pilihan itu. Sebagian besar masalah konseptual dasar dalam pengambilan keputusan parametrik dalam kepastian kapan setiap aktivitas menggabungkan hasil yang diketahui (sehingga tidak ada peluang atau kerentanan) dan hubungan antara aktivitas dan dampak tidak terpengaruh oleh aktivitas orang lain. Orang diasumsikan dapat mengevaluasi hasil, serta kegiatan. Downs<sup>4</sup> mendorong berkata, dalam konteks keputusan umum yang dipilih individual atau partai politik, dalam hal calon atau partai tersebut dianggap dapat membantu pemilih memenuhi antarmuka mendasar mereka, khususnya kehidupan finansial. Cukup untuk melihatsituasi keuangannya (egosentris) di bawah pemerintah (partai atau kandidat) saat ini dibandingkan dengan masa lalu (review), dan jangka panjang dibandingkan saat ini (review), dan di masa depan dibandingkan dengan saat ini (imminent); dan penilaian umum pemilih pada keadaan ekonomi nasional (sosiotropik) di bawah pemerintah saat ini dibandingkan dengan tahun lalu (retrospektif), dan keadaan perekonomian nasional berada di bawah nyapemerintah saat ini dibandingkan dengan waktu yang akan datang (direncanakan).

Pendidikan sosial telah memainkan peran utama dalam memperluas kerja sama politik masyarakat Seperti yang diungkapkan oleh Friedmen dan Hechter yang mengklarifikasi keberadaannya kapasitas pengajaran sosial untuk memberikan sanksi positif dan negatif kepada masyarakat sehingga berdampak pada masyarakat untuk memutuskan ikut atau tidak. Dari klarifikasi Friedmen dan Hecter dalam isu kerjasama politik Pendidikan sosial mampu memberikan dukungan kepada masyarakat untuk berperan sertamasalah legislatif. Berdasarkan persepsi para analis, ajaran sosial yang berperan dalam memperluas

kerja sama politik individu, termasuk ketua ras (KPU, PPK, PPS, dan KPPS), Partai Politik, Media Massa, dan Ormas.

## **METODE**

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Mukhtar (2013: 10) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Melalui metode ini penulis mencoba mengungkapkan Partisipasi Masyarakat Desa Perdamaian kecamatan Tanjung Morawa kabupaten Deli Serdang dalam Pemilu desa. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat mengumpulkan realita di lapangan dengan mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara, dokumentasi dan observasi.

Tujuan penelitian kualitatif adalah bukan untuk selalu mencari sebab akibat sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu. Hasil yang diperoleh dalam penelitian deskriptif selanjutnya lebih ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan analisis wawancara dan observasi deskriptif terhadap partisipasi masyarakat Desa Perdamaian kecamatan Tanjung Morawa kabupaten Deli Serdang dalam Pemilu. Observasi dilakukan sejak data awal penelusuran dan dilakukan secara terus-menerus sampai menemukan hasil yang sesuai dengan batasan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk perwujudan negara demokrasi, dimana masyarakat terlibat langsung dalam pemilihan parlemen. Dalam hal ini, masyarakat berperan penting dalam memilah pejabat-pejabat negara yang nantinya akan mengatur pemerintahan maupun program-program yang akan mereka ambil nantinya. Partisipasi politik dapat bermanfaat dalam: (1) memberikan dukungan penguasa dan pemerintah mengirinkan wakil atau pendukungnya dengan melakukan pernyataan dengan konten mendukung pemerintah dan pemilihan kandidat organisasi politik yang diusulkan; (2) menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah dengan harapan pemerintah merevisi, memperbaiki atau mengubah kelemahan-kelemahan tersebut ; (3) partisipasi sebagai tantangan terhadap otoritas untuk membawa perubahan struktur administrasi dan sistem politik.

Penelitian dengan wawancara dan observasi yang kami lakukan di desa Perdamean kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Dalam pesta demokrasi yaitu pemilu, pilkada dan pilkades, Masyarakat mempunyai peluang, hak serta kesempatan yang sama saat menentukan hak pilihnya atau pemimpinnya. Jadi partisipasi politik itu keikutsertaan khalayak dalam pemilu. Perlu kita ketahui pemahaman masyarakat terhadap hak pilihnya akan mendorong kualitas demokrasi. Dimana pada partisipasi masyarakat di desa Perdamean terakit pemilu kualitasnya sudah mulai meningkat dikarenakan adanya kesadaran dalam diri masyarakat serta pemahaman yang diberikan dari aparat desa Perdamean. Partisipasi politik di desa Perdamean sudah semakin maju, aparat desa bersedia memberikan mediasi dan mendukung partai-partai tanpa memihak partai mana pun, artinya mereka bersifat netral, saling mendukung, serta memberikan sosialisasi pemilu secara sehat. Dimana saat pemilihan kepada desa, masyarakat sangat antusias menyuarakan hak pilihnya, memilih pemimpin bukan berdasarkan jabatan, suku, ras dan budaya namun khalayak desa Perdamean memilih pemimpin lebih condong melihat kualitasnya, amanahnya dan tanggung jawabnya. Masyarakat desa Perdamean dalam menentukan pilihannya mayoritas rasional, terlihat dari masyarakat lebih melihat latar belakang atau rekam jejak kandidat. Dari pemaparan masyarakat mengatakan bahwa rekam jejak dari calon pemimpin harus di lihat supaya masyarakat tidak salah pilih pemimpin. Kepala desa Perdamean tanjung Morawa sudah menjabat 3 periode di desa ini yang artinya sudah banyak perubahan yang signifikan mulai dari jalan yang sangat apik, alat-alat setiap dusun yang tersedia, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendengarkan setiap keluh kesah ataupun aspirasi dari masyarakat. (Arniti 2020)

Khalayak banyak mendapatkan sosialisasi dari berbagai partai politik, tujuannya agar masyarakat dapat ikut berperan dalam partisipasi politik, hal itu mendapat dukungan penuh aparat desa, yang dimana disini bersifat netral artinya tidak memihak partai satu dengan partai lainya supaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam berpolitik khususnya dalam pemilu ini yang diharapkan khalayak memilih pemimpin sesuai kualitas pemimpin yang baik namun bukan dari money politik. Sosialisasi yang diadakan partai-partai memberikan dukungan kepada penguasa atau pemerintah selain itu juga masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya misalnya, keinginan khalayak, mengkritik kekurangan serta kelemahan dari pemerintah. Dengan harapan pemerintah dapat memperbaiki atau mengubah kelemahan-kelemahan tersebut agar sesuai dengan amanat konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Antusias masyarakat desa perdamaian kecamatan Tanjung Morawa kabupaten Deli Serdang dalam partisipasi pemilu terpupuk dari pendidikan politik yang baik. Dari penuturan dari kepala desa perdamaian bapak Toni Sitorus bahwa

pemerintah desa selalu melakukan sosialisasi politik dan menghimbau masyarakat turut serta dalam urusan politik dan partai politik ikut serta dalam kegiatan tersebut, hal ini dikarenakan adanya kerjasama antara pemerintah desa dan partai politik. Maka oleh sebab itu jikalau ada Pemilu partisipasi masyarakat sangat baik. (Amir 2020)

Dari hasil penelitian yang kami lakukan walaupun antusias masyarakat dalam partisipasi pemilu cukup bagus, namun beberapa masyarakat ada juga yang tidak peduli dengan pemilu. Dari keterangan masyarakat mengatakan bahwa hal tersebut di pengaruhi beberapa faktor yaitu 1). Sikap apatis dari warga tersebut, 2). Umur yang sudah lanjut usia jadi mereka susah diberikan masukan, 3). Adanya kekecewaan terhadap kandidat yang dipilih pada pemilu sebelumnya, sehingga warga tersebut merasa bahwa siapa yang terpilih nantinya tidak akan menepati janjinya.

## KESIMPULAN

Partisipasi politik bekerja dalam kaitannya dengan legitimasi demokrasi di suatu negara. Partisipasi politik yang lebih besar berarti bahwa orang mengamati, memahami dan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah. Sebaliknya, jika masyarakat acuh tak acuh terhadap masalah atau tindakan pemerintah, hal ini menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi politik. Dalam partisipasi masyarakat di desa Perdamean sehubungan dengan pemilu, kualitasnya mulai meningkat berkat kesadaran masyarakat dan pemahaman dari perangkat desa Perdamean. Selain itu, banyak juga yang bergabung dengan partai politik berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat alasan mereka bahwa bergabung dengan partai politik agar masyarakat dapat terlibat langsung dalam politik hal tersebut sangat berguna untuk mendukung demokrasi supaya berjalan dengan semestinya. Sosialisasi yang diadakan partai-partai memberikan dukungan kepada penguasa atau pemerintah selain itu juga masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya misalnya, keinginan khalayak, mengkritik kekurangan serta kelemahan dari pemerintah.

Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, dapat dikatakan bahwa meskipun antusiasme masyarakat untuk mengikuti pemilu cukup baik, namun masih ada masyarakat yang tidak peduli dengan pemilu. Gambaran masyarakat menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Maka perlu pemerintah desa dan para partai politik melakukan diskusi yang lebih baik lagi dan mencari solusi untuk mengatasi masalah yang timbul dari berbagai factor yang kami teliti, supaya masyarakat yang belum berpartisipasi penuh dalam pemilu dapat memahami pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Mushaddiq. 2020. "Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23(2): 115–31.
- Arniti, Ni Ketut. 2020. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4(2): 329.
- Indriany, Mayang. 2020. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2019 Di Kabupaten Kutai Kartanegara." *eJournal Ilmu Pemerintahan* 8(2): 545–58. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/11/MAYANG\\_jurnal\(11-04-20-08-53-51\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/11/MAYANG_jurnal(11-04-20-08-53-51).pdf).
- Ramli, Muhamad. 2013. "Partisipasi Polotik Masyarakat Desa Kadundung Kecamatan Labuan Amas Utara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Tahun 2010." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal* II(8): 53–72.
- Subiyanto, Achmad Edi. 2020. "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17(2): 355.